

The Role of Public Sector Accounting in Realizing Accountability and Transparency in Local Government Financial Management: A Case Study of the Jakarta Provincial Government

Alfia Rosalinda¹, Fina Aulia², Milenia Hikmatu Syifa³, Siti Robiatul Hadawiyah⁴, Viani^{5*}

Universitas Bina Sarana Informatika

Corresponding Author: Viani 63230225@bsi.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Public Sector Accounting, Accountability, Transparency, Good Governance, Local Finance

Received : 14, April

Revised : 28, April

Accepted: 29, May

©2025 Rosalinda, Aulia, Syifa, Hadawiyah, Viani : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the role of public sector accounting in supporting accountability and transparency in financial management within the Provincial Government of DKI Jakarta. Using a descriptive qualitative approach, the study draws on secondary data from the Audit Board of Indonesia (BPK) reports and official publications of the local government. The findings indicate that although the DKI Jakarta Provincial Government consistently receives Unqualified Opinions (WTP) from BPK, there are still notable weaknesses in asset management, social assistance distribution, and internal oversight. These findings highlight a discrepancy between formal reporting and actual financial practices. Strengthening internal control systems, promoting participatory transparency, and leveraging information technology are essential steps toward achieving accountable and transparent financial governance.

Peran Akuntansi Sektor Publik dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Alfia Rosalinda^{1*}, Fina Aulia², Milenia Hikmatu Syifa³, Siti Robiatul Hadawiyah⁴, Viani⁵

Universitas Bina Sarana Informatika

Corresponding Author: Alfia Rosalinda 63230225@bsi.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas, Transparansi, Good Governance, Keuangan Daerah

Received : 14, April

Revised : 28, April

Accepted: 29, May

©2025 Rosalinda, Aulia, Syifa, Hadawiyah, Viani : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akuntansi sektor publik dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan publikasi resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berbagai temuan menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan aset, bantuan sosial, dan pengawasan internal. Temuan ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara pelaporan formal dan realitas pengelolaan keuangan. Diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, transparansi partisipatif, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

PENDAHULUAN

Di era reformasi, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel semakin tinggi. Masyarakat berhak mengetahui dan menilai pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah. Dalam konteks ini, akuntabilitas publik menjadi kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kinerja secara terbuka. Akuntansi sektor publik berperan penting sebagai sistem informasi yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga menyediakan data untuk evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban. Tujuan akhirnya adalah memastikan pengelolaan keuangan negara berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar administrasi.

Tercapainya akuntabilitas memerlukan penerapan good governance, yang mencakup prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, dan penegakan hukum. Prinsip ini memungkinkan masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan mengakses informasi kinerja pemerintah secara terbuka. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya tuntutan etika, melainkan fondasi kepercayaan publik

Salah satu bentuk penerapan akuntabilitas dan good governance dapat dilihat dari opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah beberapa kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Meskipun demikian, berdasarkan Laporan BPK Tahun 2023, masih ditemukan permasalahan dalam pengelolaan aset dan penyaluran bansos yang menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas sistem pengelolaan keuangan daerah tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa opini WTP belum tentu menjadi indikator utuh atas tercapainya akuntabilitas publik yang sesungguhnya.

Secara hukum, pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta dapat diaudit oleh lembaga yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji peran akuntansi sektor publik dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan prinsip good governance di pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, bagaimana penerapan akuntansi sektor publik dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan agar akuntansi

sektor publik mampu berperan sebagai instrumen penting dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintahan daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan strategi penguatan sistem akuntansi sektor publik yang selaras dengan prinsip good governance guna menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan partisipatif.

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat strategis. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi sistem akuntansi sektor publik, sekaligus menjadi acuan dalam memperkuat praktik tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Bagi kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang akuntansi sektor publik serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait isu akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah. Bagi masyarakat, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik akan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari hak memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam pengawasan pemerintahan. Terakhir, bagi para pembuat kebijakan, penelitian ini menyediakan landasan teoritis dan data empiris yang dapat digunakan dalam menyusun, mengevaluasi, dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan partisipatif.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan keterbukaan publik, akuntansi sektor publik memiliki peran sentral dalam menciptakan sistem pelaporan keuangan yang dapat diakses dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntansi sektor publik merupakan sistem informasi keuangan yang digunakan oleh entitas pemerintahan untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi keuangan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan pada keuntungan. Menurut Mardiasmo (2009), akuntansi sektor publik berperan tidak hanya sebagai alat pencatatan administratif, melainkan instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas yang menyeluruh.

Hartoto et al. (2023) menekankan bahwa efektivitas akuntansi publik berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah dalam menerapkan kontrol internal, menyusun anggaran berbasis kinerja, dan menyampaikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi acuan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang relevan dan andal. Dengan demikian, akuntansi sektor publik menjadi instrumen utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merujuk pada kewajiban entitas pemerintahan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Akuntabilitas ini dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yakni akuntabilitas keuangan, kinerja, administratif, serta akuntabilitas hukum. Pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan kinerja yang dapat diaudit secara independen, baik oleh auditor internal maupun eksternal.

Ridzal. (2020) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan dan efektivitas sistem akuntansi sektor publik memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah. Dalam kerangka ini, akuntansi publik tidak hanya menjadi alat pelaporan, tetapi juga alat evaluasi untuk menilai sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya secara transparan dan efisien.

Akuntabilitas publik menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Di tingkat daerah, implementasi sistem pelaporan berbasis elektronik serta keterlibatan lembaga pengawas seperti DPRD dan BPK turut memperkuat akuntabilitas ini. Pemerintah yang akuntabel akan memiliki sistem informasi yang dapat dilacak, prosedur yang jelas, serta komitmen untuk menjawab tuntutan masyarakat terkait penggunaan anggaran. Ketika akuntabilitas diterapkan secara konsisten, akan tercipta peningkatan kinerja organisasi publik dan terbangun kepercayaan dari masyarakat.

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan

Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik adalah prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip ini menuntut keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses masyarakat, khususnya terkait pengelolaan anggaran, belanja, dan pelaporan keuangan. Transparansi keuangan yang baik tidak hanya membuka informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah dipahami, digunakan, dan ditindaklanjuti oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi aktif.

Menurut Dewi, et al. (2024), pemanfaatan teknologi informasi secara optimal terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan daerah dan e-government membuka akses masyarakat terhadap informasi anggaran secara lebih cepat dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, transparansi tercermin melalui publikasi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta penyediaan portal keuangan publik secara daring. Penerapan transparansi yang optimal dapat mencegah terjadinya praktik korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas publik secara menyeluruh.

Good Governance

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan mengawasi kegiatan sektor publik dengan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Menurut Asmawanti (2020) menyebutkan bahwa good governance mencerminkan upaya pemerintah dalam mengelola proses pengambilan keputusan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta transparansi dalam pelaksanaan kinerja.

Transparansi ini menjadi dasar pembentukan indeks akuntabilitas suatu instansi, di mana akuntabilitas mencakup pengungkapan dan pertanggungjawaban atas tindakan, laporan keuangan, serta keputusan yang diambil oleh pihak-pihak terkait. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan good governance tampak dalam pelibatan masyarakat melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), keterbukaan informasi anggaran, serta pengawasan independen melalui audit eksternal oleh lembaga seperti BPK.

Apabila prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara konsisten, akan terbentuk sistem pengelolaan keuangan yang efisien, minim penyimpangan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini, akuntansi sektor publik memegang peran strategis sebagai instrumen utama yang menyediakan informasi keuangan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung implementasi prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran akuntansi sektor publik dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Selain itu, digunakan juga referensi dari literatur ilmiah (buku, jurnal), peraturan perundang-undangan, dan artikel media daring terpercaya.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis). Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menafsirkan isi dari dokumen-dokumen yang dikaji untuk menemukan informasi penting yang sesuai dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, isu utama, serta hubungan antara teori dan praktik di lapangan. Hasil analisis ini kemudian disusun secara deskriptif dan dikaitkan dengan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

HASIL PENELITIAN

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, sebagaimana disampaikan dalam rapat paripurna DPRD pada tanggal 25 Juli 2024. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Penilaian ini diberikan karena laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menyajikan informasi keuangan secara wajar dalam semua hal yang material.

Namun demikian, opini WTP tersebut tidak serta-merta mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan telah sepenuhnya akuntabel. BPK tetap mencatat sejumlah temuan material yang menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengelolaan aset, pengawasan anggaran, serta efektivitas belanja sosial. Berikut adalah ringkasan dari temuan-temuan utama BPK:

Pencatatan ganda aset tetap berupa tanah

Ditemukan permasalahan dalam pencatatan aset tetap berupa tanah, khususnya yang berkaitan dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), yang belum sepenuhnya didukung oleh dokumen serah terima atau berita acara dari pihak pengembang.

Penyelesaian Aset Konstruksi yang Berlarut-larut

Sejumlah aset tetap kategori konstruksi dalam pengerjaan belum diselesaikan dalam waktu yang wajar, menunjukkan lemahnya manajemen proyek pemerintah daerah.

Pendapatan dari sewa lahan belum diterima dan tidak didukung oleh perjanjian kerja sama

BPK menemukan bahwa terdapat pendapatan daerah dari sewa lahan milik pemerintah yang belum diterima, serta belum adanya perjanjian kerja sama tertulis dengan pihak ketiga, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kelebihan pembayaran belanja dan kekurangan volume pekerjaan dalam pengadaan barang dan jasa

Dalam pelaksanaan pengadaan, ditemukan indikasi kelebihan pembayaran serta kekurangan volume pekerjaan, namun belum dilakukan pengenaan denda atau sanksi sebagaimana mestinya.

Penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak sesuai kriteria

Ditemukan bahwa bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan tidak seluruhnya diberikan kepada penerima yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.

Belum tersedianya mekanisme pencatatan hibah dari pemerintah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki mekanisme yang memadai dalam mencatat hibah langsung dari pemerintah pusat secara tepat dan akurat dalam laporan keuangan.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun opini WTP telah diraih, masih terdapat permasalahan substantif dalam pengelolaan keuangan yang dapat menghambat pencapaian akuntabilitas dan transparansi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pembenahan, terutama dalam penguatan sistem pengendalian internal, pencatatan aset, pengelolaan pendapatan daerah, serta validasi penerima manfaat program sosial.

PEMBAHASAN

Penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum telah mengikuti kerangka Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dibuktikan melalui pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun berturut-turut. Pencapaian ini mencerminkan bahwa laporan keuangan daerah telah memenuhi standar pelaporan secara administratif. Namun demikian, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2023, opini tersebut belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan dalam aspek akuntabilitas publik yang bersifat menyeluruh.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penyajian laporan yang sesuai dengan aturan, tetapi juga harus tercermin dari sejauh mana anggaran dikelola secara efektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi masyarakat. BPK mencatat sejumlah temuan, seperti masalah pencatatan ganda pada aset tetap, pendapatan dari sewa aset yang belum diterima, serta bantuan sosial yang diberikan kepada penerima yang tidak memenuhi syarat. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang seharusnya menjadi fondasi dari akuntabilitas keuangan daerah.

Upaya transparansi sebenarnya telah dilakukan melalui penyediaan dokumen anggaran dan laporan keuangan yang dapat diakses publik, misalnya melalui portal resmi milik pemerintah daerah. Namun, transparansi tersebut cenderung bersifat satu arah, tanpa menyediakan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk turut terlibat dalam pengawasan atau evaluasi anggaran secara langsung. Hal ini belum selaras dengan prinsip *good governance* yang menekankan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan.

Berdasarkan teori akuntansi sektor publik, informasi keuangan idealnya tidak hanya diposisikan sebagai alat pelaporan, melainkan juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perencanaan kebijakan secara lebih strategis. Namun, fungsi ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Laporan keuangan belum secara konsisten dikaitkan dengan pencapaian kinerja pelayanan publik, sehingga potensi akuntansi sebagai alat kontrol dan evaluasi belum sepenuhnya dijalankan.

Selain itu, masih ada sejumlah tantangan yang memperburuk situasi, seperti prosedur birokrasi yang rumit, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran, serta lemahnya fungsi audit internal. Ketiadaan dokumentasi yang memadai dan minimnya koordinasi dengan pihak ketiga, termasuk BUMD dan swasta, juga menimbulkan risiko hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara keseluruhan, pencapaian opini WTP memang penting dari sisi kepatuhan, tetapi belum bisa dijadikan tolok ukur mutlak keberhasilan dalam akuntabilitas publik. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan dalam pengawasan internal, pemanfaatan teknologi informasi secara lebih inklusif, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam siklus perencanaan dan evaluasi anggaran. Dengan langkah-langkah tersebut, akuntansi sektor publik diharapkan dapat menjalankan peran strategisnya sebagai alat kontrol, evaluasi, dan penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil telaah terhadap data yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, serta dikaitkan dengan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa poin temuan sebagai berikut:

Opini WTP Belum Menjamin Akuntabilitas secara Substantif

Perolehan opini WTP yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kepatuhan terhadap aspek pelaporan formal. Namun, berbagai temuan dalam laporan audit mengindikasikan bahwa pencapaian administratif tersebut belum mencerminkan keberhasilan dalam hal akuntabilitas keuangan yang bersifat substantif, khususnya terkait pengelolaan aset dan belanja sosial.

Transparansi Masih Bersifat Informasional, Bukan Partisipatif

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan informasi anggaran melalui platform daring sebagai bentuk keterbukaan. Meskipun begitu, mekanisme ini belum disertai dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan maupun evaluasi, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi yang inklusif sebagaimana ditetapkan dalam konsep good governance.

Penerapan Prinsip Good Governance Masih Terbatas

Temuan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik masih bersifat parsial. Berbagai hambatan struktural seperti birokrasi yang berbelit, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya pengawasan internal menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif.

Fungsi Akuntansi Belum Optimal sebagai Alat Evaluasi Kinerja

Peran akuntansi sektor publik masih dominan sebagai alat pelaporan, bukan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran dan kinerja pelayanan publik. Hal ini bertentangan dengan

pandangan teoritis yang menempatkan akuntansi sebagai alat strategis dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis hasil (outcome-based).

Kesenjangan antara Laporan Keuangan dan Kondisi Lapangan

Beberapa temuan audit, seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, pendapatan daerah yang belum ditagih, dan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang tercantum dalam laporan keuangan dan realitas pelaksanaan. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam dokumentasi serta pengawasan internal.

Kurangnya Kolaborasi dengan Mitra Eksternal

Minimnya sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMD, pihak swasta, serta lembaga audit independen turut menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan efektivitas tata kelola anggaran. Kurangnya koordinasi ini juga berpotensi menyebabkan kehilangan potensi pendapatan daerah dan menurunkan efektivitas kontrol eksternal.

Secara keseluruhan, temuan-temuan di atas menekankan perlunya pembenahan mendasar dalam penerapan akuntansi sektor publik, khususnya agar perannya tidak sekadar administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas yang lebih partisipatif dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan akuntansi sektor publik di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dapat disimpulkan bahwa meskipun laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten, hal tersebut belum mencerminkan pencapaian akuntabilitas publik secara substantif.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kelemahan mendasar, seperti ketidaktertiban dalam pengelolaan aset tetap, belum optimalnya pencatatan hibah, serta penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Selain itu, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih bersifat satu arah dan belum mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses evaluasi anggaran.

Dalam konteks good governance, hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas masih belum berjalan secara menyeluruh. Akuntansi sektor publik belum sepenuhnya digunakan sebagai alat evaluatif dan strategis, melainkan masih sebatas instrumen pelaporan administratif. Oleh karena itu, peran akuntansi perlu diperkuat agar dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa saran strategis yang dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki sistem

pengelolaan keuangan daerah ke depan, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal guna memastikan setiap tahapan dalam proses pengelolaan keuangan dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan. Hal ini juga harus didukung dengan pelatihan berkelanjutan bagi para pegawai pengelola keuangan agar memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip akuntansi sektor publik.

Kedua, upaya peningkatan transparansi harus disertai dengan keterlibatan aktif masyarakat. Transparansi tidak cukup hanya melalui publikasi dokumen keuangan, tetapi juga melalui penyediaan ruang partisipatif seperti forum diskusi anggaran atau pemanfaatan aplikasi digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan masukan serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran secara langsung.

Ketiga, pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi akuntansi sektor publik tidak hanya sebagai alat penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana anggaran yang digunakan memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Keempat, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dengan berbagai mitra eksternal seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor swasta, dan lembaga pengawas independen. Kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas kontrol eksternal dan memperkuat akuntabilitas publik.

Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi harus dimaksimalkan melalui sistem informasi keuangan yang terintegrasi, berbasis digital, dan mudah diakses oleh publik. Sistem ini dapat mempercepat proses pelaporan, mempermudah pengawasan internal dan eksternal, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip good governance yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah penyimpangan keuangan daerah. Selain itu, studi mengenai pengaruh partisipasi masyarakat terhadap transparansi anggaran juga penting dilakukan. Penelitian lain bisa mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan keuangan daerah, serta peran akuntansi sektor publik dalam mengukur kinerja program pemerintah secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga dari hasil dan dampaknya bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 85-94.
- BPK, h. (2024, juli 25). BPK Soroti Temuan Penting dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta TA 2023. Retrieved from <https://www.bpk.go.id:https://www.bpk.go.id/news/bpk-soroti-temuan-penting-dalam-laporan-keuangan-pemprov-dki-jakarta-ta-2023>
- Dewi, S. R. K., Jumarpati, J., & Ramli, R. (2024). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palopo. *YUME: Journal of Management*, 7(2), 1134-1145.
- Hartoto, H., Tatmimah, I., Endraria, E., Muzayyanah, M., Sriyani, S., Djasuli, M., ... & Ardhiarisca, O. (2023). Akuntansi sektor publik. Penerbit Widina.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87-97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>